

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian terkait analisis SiLPA dan daya serap anggaran pada APBD Kabupaten Timor Tengah Utara, maka peneliti dapat menjelaskan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tingkat pertumbuhan SiLPA periode 2015-2018 mengalami fluktuatif.

Pada tahun 2015 SiLPA mengalami penurunan sebesar 21,11% dari tahun sebelumnya. Tahun 2016 SiLPA pun mengalami penurunan sebesar 35,81%. Tahun 2017 SiLPA mengalami kenaikan sebesar 41,84% dan tahun 2018 SiLPA juga mengalami penurunan sebesar 18.10%.

- 2) Faktor-faktor penyebab timbulnya SiLPA pada APBD Kabupaten TTU tahun anggaran 2015-2018 menunjukkan bahwa:

- a) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Pelampauan pendapatan asli daerah yang ditunjukkan oleh data yang diperoleh peneliti bahwa realisasi PAD lebih besar dari jumlah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten TTU. Pendapatan asli daerah yang paling berpotensi adalah pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- b) Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pelampauan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditunjukkan oleh data yang diperoleh peneliti bahwa realisasi lain-lain pendapatan daerah

yang sah lebih besar dari jumlah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten TTU. Lain lain pendapatan daerah yang sah yang paling berpotensi adalah penerimaan dana penyesuaian dan otonomi khusus.

c) Pelampauan penerimaan pembiayaan

Pelampauan penerimaan pembiayaan ditunjukkan oleh data yang diperoleh peneliti bahwa realisasi selalu lebih besar jumlahnya dari jumlah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten TTU. Penerimaan pembiayaan yang paling berpotensi adalah penggunaan SiLPA tahun lalu dan investasi non permanen lainnya.

d) Penghematan Belanja

Penghematan belanja daerah yang ditunjukkan oleh data yang diperoleh peneliti bahwa realisasi selalu lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten TTU. Penghematan belanja merupakan sumber terbesar penyebab terjadinya SiLPA disetiap tahun anggaran dari tahun 2015-2018.

e) Sisa Dana Kegiatan

Sisa dana kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten TTU belum selesai bahkan belum sama sekali dilaksanakan pemerintah daerah merupakan salah satu penyebab timbulnya SiLPA.

3) Rata-rata Efektivitas serapan anggaran belanja pada APBD Kabupaten TTU tahun anggaran 2015-2018 berada pada skala 80%-90% dengan

kriteria efektif. Namun masih adanya serapan anggaran yang kurang maksimal terutama pada anggaran yang pengalokasiannya cukup besar.

- 4) Rata-rata tingkat pertumbuhan anggaran belanja pada APBD Kabupaten TTU tahun anggaran 2015-2018 cenderung menurun. Naik turunnya tingkat pertumbuhan anggaran disebabkan banyaknya anggaran yang mengalami penurunan realisasi anggaran.
- 5) Masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten TTU dalam penyerapan anggaran adalah lemahnya perencanaan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang kurang cermat dalam membuat jadwal untuk menjalankan program dan kegiatan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

- 1) Pertumbuhan SiLPA yang mengalami fluktuatif selama 4 tahun dari 2015-2018 disarankan agar Pemerintah Kabupaten TTU untuk memanfaatkan SiLPA yang ada untuk menutup defisit anggaran, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas belanja langsung dan mendanai kewajiban yang sampai pada akhir tahun belum diselesaikan.
- 2) Dalam perencanaan anggaran diharapkan agar Pemerintah Kabupaten TTU lebih cermat dalam menetapkan target anggaran sehingga dalam realisasinya anggaran tidak mengalami pelampauan penerimaan dan juga anggaran belanja dapat terserap dengan optimal.
- 3) Dalam penyerapan anggaran belanja daerah disarankan agar Pemerintah Kabupaten TTU memperhatikan program dan kegiatan yang telah

dianggarkan supaya benar-benar dilaksanakan sehingga anggaran yang telah ada dapat terserap dengan maksimal.

- 4) Lemahnya perencanaan intern dari OPD maka disarankan untuk mempertegas dan menegakan aturan mengenai disiplin waktu pelaksanaan anggaran sehingga OPD sungguh-sungguh bekerja sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sehingga pelaksanaan anggaran tidak mengalami keterlambatan dan pada akhirnya semua program dan kegiatan dapat terlaksana dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Saputra. 2018. *Analisis Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2012-2016*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Erlangga

Christoper S. 2015. *Analisis SiLPA dan Penyerapan Anggaran Pada Perhitungan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2010-2012*. Jogjakarta, Repository Universitas Gadjah Mada.

Erlina, Omar S. Rambe dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Salemba Empat

Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah)*. Jakarta: Salemba Empat

<http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2019/08/19/apbd-ntt-defisit-rp208751-miliar-lebih/>

<https://ekorannt.com/2019/09/09/hingga-agustus-2019-realisis-penyerapan-apbd-ttu-baru-375-persen/>

<https://economy.okezone.com/read/2019/06/20/20/2068682/selisih-anggaran-daerah-rp20-triliun-pemda-diminta-genjot-penyerapan>

<https://tirto.id/serapan-anggaran-rendah-apa-dampaknya-bagi-publik-cGTk>

Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga

Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Martiamini, Siti. 2019. *Analisis Serapan Anggaran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tahun Anggaran 2015-2018*. Banda Aceh, Universitas Muhammadiyah Aceh

Nurdyanto, Dadang dan Djoko Mursinto. 2016. *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sebagai Salah Satu Sumber Penghambat Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Jombang*. Surabaya, Universitas Airlangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006, *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 249/PMK.02/2011 Tentang *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.

Ratmono, Dwi dan Mahfud Sholilin. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian & Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.